

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026**



**JL. KAPTEN ANWAR SASTRO PALEMBANG TELP 311517
TAHUN 2026**

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi , maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

" Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)"

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2018-2024; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2025-2030; mengikuti Prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045, yang bertajuk "**Sumsel MAPAN 2045**" (**Maju, Terdepan, Berkelanjutan**); memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Sasaran

- Meningkatnya jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial;
- Meningkatnya jumlah panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
- Meningkatnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
- Meningkatnya jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
- Meningkatnya jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
- Meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
- Meningkatnya jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi

3. Belanja dan Program APBD

a. Belanja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Total Pagu Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.33.626.681.542,- yang terdiri atas :

Belanja Operasi

- *Belanja Pegawai*
- *Belanja Barang dan Jasa*

: Rp.33.610.181.542.-

: Rp. 20.769.317.575,- (61,80%)

: Rp. 12.840.863.967,- (38,20%)

Belanja Modal : Rp.16.500.000.-
➤ *Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 16.500.000,- (100%)*

b. Program dan Anggaran APBD

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program dan 16 Kegiatan dan 66 sub kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Anggaran = Rp. 23.721.171.542,- Realisasi = Rp. 4.526.652.176 atau keuangan 19,08% dan fisik 20%
- b) Program Pemberdayaan Sosial Anggaran = Rp.300.000.000,- Realisasi = Rp. 0 atau keuangan 0% dan fisik 10%
- c) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Anggaran = Rp. 35.000.000,- Realisasi = Rp. 1.999.015 atau keuangan 5,71% dan fisik 10%
- d) Program Rehabilitasi Sosial Anggaran = Rp.8.058.120.000,- Realisasi = Rp. 956.856.863 atau keuangan 11,13% dan fisik 20%
- e) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Anggaran = Rp.519.390.000,- Realisasi = Rp. 2.809.580 atau keuangan 0,54% dan fisik 15%
- f) Program Penanganan Bencana Anggaran = Rp.709.000.000,- Realisasi = Rp. 48.485.980 atau Keuangan 6,84% dan fisik 10 %
- g) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Anggaran = Rp.284.000.000,- Realisasi = Rp. 12.000.000 atau Keuangan 4,23% dan fisik 15%

4. Indikator Kinerja Dinas Sosial (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

Sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif target 57,32 %

5. Kegiatan Dinas Sosial Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut :

- a) Kota Palembang
Terdapat 11 kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang, antara lain sebagai berikut :
 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant
 5. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar didalam Pant
 6. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis didalam Pant
 7. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 8. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

9. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
 10. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 11. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- b) Kota Lubuklinggau
Terdapat 6 kegiatan yang dilaksanakan di Kota Lubuk Linggau, antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar didalam Pant
 3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
 6. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- c) Kota Pagar Alam
Terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan di Kota Pagar Alam , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- d) Kota Prabumulih
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kota Prabumulih , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- e) Kabupaten Musi Rawas
Terdapat 7 kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant
 3. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar didalam Pant
 4. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 5. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 6. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant

7. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- f) Kabupaten OI
Terdapat 8 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. OI, antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
 3. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar didalam Panti
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS didalam panti
 5. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 6. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 7. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 8. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- g) Kabupaten Banyuasin
Terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Banyuasin , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- h) Kabupaten Musi Banyuasin
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Musi Banyuasin , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar didalam Panti
 3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- i) Kabupaten Muara Enim
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Muara Enim , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

- j) Kabupaten Empat Lawang
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Empat Lawang, sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- k) Kabupaten Lahat
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Lahat , antara lain sbb :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- l) Kabupaten OKI
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. OKU, antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
- m) Kabupaten OKU
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. OKU , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

- n) Kabupaten OKUS
Terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan di Kab.OKUS , antara lain sbb :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- o) Kabupaten OKUT
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab.OKUT , antara lain sbb :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- p) Kabupaten Pali
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Pali , yaitu :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- q) Kabupaten Muratara
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab.Muratara , yaitu :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor : 000.7.2.8/0351/Bappeda-V/2026 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026 serta sebagai bahan masukan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

A. Perbandingan antara Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Target s.d. Akhir Tahun	Realisasi s.d. Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	Rp.33.626.681.542-	Rp.5.548.803.614,-	25,00	16,50	100,00	20,00
Belanja Operasi	Rp.33.610.181.542,-	Rp.5.548.803.614,-	25,00	16,50	100,00	20,00
Belanja Modal	Rp.16.500.000,-	Rp.0,-	25,00	0,00	100,00	10,00

1. Realisasi Belanja Dinas Sosial dana APBD Provinsi Sumatera Selatan;

a) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.5.548.803.614,- atau 16,50% dan realisasi fisik 20,00%.

b) Realisasi Belanja (Operasi, Modal, Tidak Terduga dan Transfer)

Belanja Operasi pagu Rp.33.610.181.542,- realisasi keuangan Rp.5.548.803.614,- atau 16,50% dan fisik 20,00%

- Belanja Pegawai Pagu Rp. 20.769.317.575,- realisasi keuangan Rp.4.141.518.202,- atau 19,94% dan fisik 25,00%
- Belanja Barang dan Jasa pagu Rp.12.840.863.967,- realisasi keuangan Rp.1.407.285.412,- atau 10,95% dan fisik 15,00%

Belanja Modal Pagu Rp.16.500.000,- realisasi keuangan Rp.0,- atau 0,00% dan fisik 10%

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan pagu Rp.16.500.000,- realisasi keuangan Rp.0,- atau 0,00% dan fisik 10,00%

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Target s.d. Akhir Tahun	Realisasi s.d. Bulan ini

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	Rp.33.626.681.542,-	Rp.5.548/803.614,-	25,00	16,50	100,00	20,00
Belanja Operasi	Rp.33.610.181.542,-	Rp.5.548.803.614,-	25,00	16,50	100,00	20,00
Belanja Pegawai	Rp.20.769.317.575,-	Rp.4.141.518.202,-	25,00	19,94	100,00	25,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.12.840.863.967,-	Rp.1.407.285.412,-	25,00	10,95	100,00	15,00
Belanja Modal	Rp.16.500.000,-	Rp.0,-	25,00	0,00	100,00	10,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.16.500.000,-	Rp.0,-	25,00	0,00	100,00	10,00

2. Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah tahun 2026 yang tercantum pada :

Perbandingan Indikator Kinerja SKPD berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk target tahun 2026 adalah :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%)	57,32 %	57,63 %	100,72%

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Indikator yang tercapai yaitu :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Indeks Kesejahteraan Sosial) target 57,32 % realisasi 57,63 % capaian 100,72 %.

3. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

II. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 secara umum penyerapan anggaran telah mendekati target yang ditetapkan.

b. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dinas Sosial dalam percepatan pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

III. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2026. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, April 2026
Plt. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan



Prof. Dr.H.Achmad Tarmizi, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP.19660609 1995121001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN MARET/TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Bobot (%)	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Keterangan/Kendala/ Hambatan
							(Rp)	Bobot (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL											
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi	%	100%	20,00	23.721.171.542	4.526.652.176	19,08	20,00	APBD	17 Kabupaten/Kota	-
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilakukan	Dokumen	3 Dokumen	8,33	135.000.000	4.916.453,00	3,64	8,33	APBD	17 Kabupaten/Kota	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4 Dokumen	15,00	60.000.000	4.916.453	8,19	15,00	APBD	Palembang	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12 Laporan	10,00	75.000.000	-	0,00	10,00	APBD	17 Kabupaten/Kota	-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan administrasi keuangan PD yang dilaksanakan	Unit	68 Unit	8,75	21.044.317.575	4.141.518.202,00	19,68	8,75	APBD	Palembang dan OI	-
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gai dan Tunjangan ASN	orang/bln	222 orang/bln	25,00	20.769.317.575	4.141.518.202	19,94	25,00	APBD	Palembang dan OI	-
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	Dokumen	12 Dokumen	10,00	275.000.000		0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI	-
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Lokasi	3 Lokasi	5,00	62.000.000	-	0,00	5,00	APBD	Palembang dan OI	-
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Unit	1 Unit	10,00	12.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI	-
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	20 Orang	10,00	50.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI	-
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	Orang	500 Orang	10,00	398.000.000	33.197.401	8,34	10,00	APBD	Palembang dan OI	-
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	55,00	18.000.000	8.994.500	49,97	55,00	APBD	Palembang dan OI	-
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12 paket	10,00	30.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI	-
3	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	12 paket	10,00	110.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI	-
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	1 Lap	15,00	240.000.000	24.202.901	10,08	15,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan PD yang terlaksana	%	100%	25,00	1.912.253.967	347.020.120	18,15	25,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	30,00	6.000.000	1.500.000	25,00	30,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	25,00	680.453.967	152.535.120	22,42	25,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12 Laporan	20,00	1.225.800.000	192.985.000	15,74	20,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan BMD yang terlaksana	%	100%	7,50	169.600.000	-	0,00	7,50	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Unit	45 Unit	10,00	140.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3 unit	10,00	20.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50 Unit	10,00	9.600.000	-	0,00	10,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase kegiatan Pemberdayaan Sosial yang terlaksana	%	100%	10,00	300.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
A	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase PSKS yang mendapatkan kapasitas kewenangan provinsi	%	100%	10,00	300.000.000	-	0,00	10,00	APBD	17 Kab/Kota	-
1	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	Lembaga	100 Lembaga	10,00	50.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
2	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan provinsi	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan/atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	org	100 org	10,00	50.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
3	Fasilitasi Pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi warakawuri/ keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda duda perintis kemerdekaan	Jumlah warakawuri/keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda duda perintis kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	100 Orang	10,00	150.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
4	Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Jumlah Orang yang mengikuti dan mendapatkan pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai nilai kepahlawanan	Orang	100 Orang	10,00	50.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase kegiatan Penanganan Warga Negara Migran tindak kekerasan yang terlaksana	%	100%	10,00	35.000.000	1.999.015	5,71	10,00	APBD	SumSel	-
A	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Prosentase kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal yang terlaksana	%	100%	10,00	35.000.000	1.999.015	5,71	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota	org	50 org	10,00	35.000.000	1.999.015	5,71	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan program Rehabilitasi Sosial	%	100%	20,00	8.058.120.000	956.856.863	11,87	20,00	APBD	SumSel	-
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Prosentase Disabilitas terlantar yg terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100%	7,50	524.885.000	58.424.720	11,13	7,50	APBD	SumSel	-
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	25 org	15,00	243.375.000	20.924.720	8,60	15,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	25 org	10,00	15.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-

3	Penyediaan Asrama yang Mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	25 org	10,00	9.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	25 org	10,00	15.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	25 org	20,00	227.510.000	37.500.000	16,48	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
6	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	25 org	10,00	15.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
B	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Prosentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100%	13,33	1.520.775.000	219.564.511	14,44	13,33	APBD	17 kab/Kota	-
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	130 org	20,00	1.034.775.000	167.064.511	16,15	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	130 org	10,00	50.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	130 org	10,00	15.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	130 org	20,00	366.000.000	52.500.000	14,34	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas hidup sehari - hari kewenangan provinsi	Orang	130 org	10,00	25.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
6	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	130 org	10,00	30.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
C	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Prosentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100%	7,92	2.506.000.000	227.196.714	9,07	7,92	APBD	17 kab/Kota	-
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200 org	15,00	1.971.000.000	167.196.714	8,48	15,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200 org	10,00	62.500.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
3	Penyediaan Asrama yang Mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200 org	10,00	7.500.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	200 org	10,00	25.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200 org	20,00	360.000.000	60.000.000	16,67	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas hidup sehari - hari kewenangan provinsi	Orang	200 org	10,00	25.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
7	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200 org	10,00	5.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
8	Pemulasaran	Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi	Orang	200 org	10,00	50.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
D	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100%	10,50	2.264.950.000	335.017.095	14,79	10,50	APBD	17 kab/Kota	-
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	180 org	20,00	1.801.950.000	286.517.095	15,90	20,00	APBD	17 kab/Kota	-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	180 org	10,00	60.000.000	-	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	-

3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	Orang	180 org	10,00	35.000.000	-	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	180 org	20,00	288.000.000	44.500.000	15,45	20,00	APBD	17 kab/Kota	-
5.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas hidup sehari - hari kewenangan provinsi	Orang	180 org	25,00	20.000.000		20,00	25,00	APBD	17 kab/Kota	-
6	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	180 org	10,00	30.000.000	-	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
7	Pemulasaran	Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi	Orang	180 org	10,00	30.000.000	-	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
E	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya si Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam pant	%	100%	17,86	1.241.510.000	116.653.823	9,40	17,86	APBD	17 kab/Kota	-
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100 org	10,00	450.900.000	18.855.853	4,18	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100 org	10,00	37.500.000	-	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	Orang	100 org	10,00	7.200.000	-	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100 org	20,00	576.800.000	72.800.000	12,62	20,00	APBD	17 kab/Kota	-
5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas hidup sehari - hari kewenangan provinsi	Orang	100 org	55,00	56.000.000		44,64	55,00	APBD	17 kab/Kota	-
6	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100 org	10,00	32.500.000	-	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
7	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli anak, lanjut usia dan disabilitas serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Lainnya	Orang	600 Orang	10,00	80.610.000	-	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase kegiatan perlindungan dan jaminan sosial yang terlaksana	100%	100%	15,00	519.390.000	2.809.580	0,54	15,00	APBD	17 kab/Kota	-
A	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskir cakupan daerah kewenangan provinsi	kab/kota	17 kab/kota	11,67	519.390.000	2.809.580	0,54	11,67	APBD	17 kab/Kota	-
1	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Masyarakat	Orang	1.200 Orang	10,00	36.360.000	-	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi	Orang	51 Orang	10,00	244.390.000	1.637.080	0,67	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang aktif melaksanakan pemutakhiran Data Fakir Miskin	Keluarga	17 Kab/Kota	10,00	188.640.000	-	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
4	Fasilitasi Pengembangan potensi pendamping program bantuan sosial	Jumlah Pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Orang	51 Orang	15,00	50.000.000	1.172.500	2,35	15,00	APBD	17 kab/Kota	-
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase layanan penanganan bencana yang terlaksana	%	100%	10,00	709.000.000	48.485.980	6,84	10,00	APBD	17 kab/Kota	-

A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Prosentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100%	9,00	709.000.000	48.485.980	6,84	9,00	APBD	17 kab/Kota	-
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah pengungsi yang mendapatkan permakanan 3x1hari dalam masa tanggap darurat kewenangan provinsi	Orang	3.000 org	10,00	300.000.000	-	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
2	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan provinsi	Orang	1.000 org	25,00	225.000.000	48.485.980	21,55	25,00	APBD	17 kab/Kota	-
3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan provinsi	Orang	50 org	10,00	184.000.000	-	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	-
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase TMP yang terpelihara	%	100%	15,00	284.000.000	12.000.000	4,23	15,00	APBD	Palembang	-
A	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Prosentase kegiatan pengelolaan TMP yang terlaksana	%	100%	13,33	284.000.000	12.000.000	4,23	13,33	APBD	Palembang	-
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaanny pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	makam	12 makam	10,00	12.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Palembang	-
2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	laporan	12 laporan	20,00	72.000.000	12.000.000	16,67	20,00	APBD	Palembang	-
3	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang	100 Orang	10,00	200.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Palembang	-
	Jumlah					33.626.681.542	5.548.803.614	16,50	20,00	APBD	17Kab/Kota	-

Jumlah Program : 7 Program
Jumlah Kegiatan : 16 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan : 66 Sub Kegiatan

Palembang, 2026
Pit.KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Prof.Dr.H.Achmad Tarmizi, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19660609 1995121001

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026**



**JL. KAPTEN ANWAR SASTRO PALEMBANG Telp 311517
TAHUN 2026**

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi , maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

" Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)"

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2018-2024; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2025-2030; mengikuti Prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045, yang bertajuk "**Sumsel MAPAN 2045**" (**Maju, Terdepan, Berkelanjutan**); memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Sasaran

- Meningkatnya jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial;
- Meningkatnya jumlah panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
- Meningkatnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
- Meningkatnya jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
- Meningkatnya jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
- Meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
- Meningkatnya jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi

3. Belanja dan Program APBD

a. Belanja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Total Pagu Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.33.184.675.703,- yang terdiri atas :

Belanja Operasi

- *Belanja Pegawai*
- *Belanja Barang dan Jasa*

: Rp.33.175.675.703.-

: Rp. 20.769.317.575,- (62.60 %)

: Rp. 12.406.358.128,- (37.39 %)

Belanja Modal : Rp.9.000.000.-
➤ *Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 9.000.000,- (100%)*

b. Program dan Anggaran APBD

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program dan 16 Kegiatan dan 66 sub kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Anggaran = Rp. 23.632.083.703,- Realisasi = Rp. 8.963.229.482 atau keuangan 37,93% dan fisik 40%
- b) Program Pemberdayaan Sosial Anggaran = Rp.254.950.000,- Realisasi = Rp. 9.929.015 atau keuangan 3,8% dan fisik 35%
- c) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Anggaran = Rp. 25.000.000,- Realisasi = Rp. 3.925.140 atau keuangan 15,70% dan fisik 20%
- d) Program Rehabilitasi Sosial Anggaran = Rp.7.900.202.000,- Realisasi = Rp. 2.730.543.520 atau keuangan 34.56% dan fisik 45%
- e) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Anggaran = Rp.417.120.000,- Realisasi = Rp. 45.489.815 atau keuangan 10,91% dan fisik 35%
- f) Program Penanganan Bencana Anggaran = Rp.679.000.000,- Realisasi = Rp. 142.865.980 atau Keuangan 21,04 % dan fisik 35 %
- g) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Anggaran = Rp.276.320.000,- Realisasi = Rp. 23.877.450 atau Keuangan 8,64% dan fisik 35%

4. Indikator Kinerja Dinas Sosial (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

Sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif target 57,32 %

5. Kegiatan Dinas Sosial Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut :

- a) Kota Palembang
Terdapat 11 kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang, antara lain sebagai berikut :
 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant
 5. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar didalam Pant
 6. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis didalam Pant
 7. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

8. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 9. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
 10. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 11. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- b) Kota Lubuklinggau
Terdapat 6 kegiatan yang dilaksanakan di Kota Lubuk Linggau, antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar didalam Pant
 3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
 6. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- c) Kota Pagar Alam
Terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan di Kota Pagar Alam , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- d) Kota Prabumulih
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kota Prabumulih , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- e) Kabupaten Musi Rawas
Terdapat 7 kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant
 3. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar didalam Pant
 4. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 5. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

6. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
 7. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- f) Kabupaten OI
- Terdapat 8 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. OI, antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant
 3. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar didalam Pant
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS didalam pant
 5. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 6. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 7. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
 8. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- g) Kabupaten Banyuasin
- Terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Banyuasin , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- h) Kabupaten Musi Banyuasin
- Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Musi Banyuasin , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar didalam Pant
 3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- i) Kabupaten Muara Enim
- Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Muara Enim , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

- j) Kabupaten Empat Lawang
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Empat Lawang, sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- k) Kabupaten Lahat
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Lahat , antara lain sbb :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- l) Kabupaten OKI
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. OKU, antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
- m) Kabupaten OKU
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. OKU , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- n) Kabupaten OKUS
Terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan di Kab.OKUS , antara lain sbb :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- o) Kabupaten OKUT
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab.OKUT , antara lain sbb :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- p) Kabupaten Pali
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Pali , yaitu :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- q) Kabupaten Muratara
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab.Muratara , yaitu :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor : 000.7.2.8/0351/Bappeda-V/2026 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026 serta sebagai bahan masukan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan II pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

A. Perbandingan antara Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Target s.d. Akhir Tahun	Realisasi s.d. Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	Rp.33.184.675.703-	Rp.11.919.860.402,-	50,00	35,91	100,00	40,00
Belanja Operasi	Rp.33.175.675.703,-	Rp.11.919.860.402,-	50,00	35,92	100,00	50,00
Belanja Modal	Rp.9.000.000,-	Rp.0,-	50,00	0,00	100,00	30,00

1. Realisasi Belanja Dinas Sosial dana APBD Provinsi Sumatera Selatan;

a) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.11.919.860.402,- atau 35,91% dan realisasi fisik 40,00%.

b) Realisasi Belanja (Operasi, Modal, Tidak Terduga dan Transfer)

Belanja Operasi pagu Rp.33.175.675.703,- realisasi keuangan Rp.11.919.860.402,- atau 35,92% dan fisik 40,00%

- Belanja Pegawai Pagu Rp. 20.769.317.575,- realisasi keuangan Rp.7.964.440.627,- atau 38,34% dan fisik 40,00%
- Belanja Barang dan Jasa pagu Rp.12.406.358.128,- realisasi keuangan Rp.3.955.419.775,- atau 31,88% dan fisik 40,00%

Belanja Modal Pagu Rp.9.000.000.- realisasi keuangan Rp.0.- atau 0,00% dan fisik 30%

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan pagu Rp.9.000.000.- realisasi keuangan Rp.0,- atau 0,00% dan fisik 30,00%

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Target s.d. Akhir Tahun	Realisasi s.d. Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	Rp.33.184.675.703-	Rp.11.919.860.402,-	50,00	35,92	100,00	40,00
Belanja Operasi	Rp.33.175.675.703,-	Rp.11.919.860.402,-	50,00	35,92	100,00	50,00
Belanja Pegawai	Rp.20.769.317.575,-	Rp.7.964.440.627,-	50,00	38,34	100,00	50,00

Belanja Barang dan Jasa	Rp.12.406.358.128,-	Rp.3.955.419.775,-	50,00	31,88	100,00	50,00
Belanja Modal	Rp.9.000.000,-	Rp.0,-	50,00	0,00	100,00	30,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.9.000.000,-	Rp.0,-	50,00	0,00	100,00	30,00

2. Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah tahun 2026 yang tercantum pada :

Perbandingan Indikator Kinerja SKPD berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk target tahun 2026 adalah :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%)	57,32 %	57,63 %	100,72%

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Indikator yang tercapai yaitu :

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Indeks Kesejahteraan Sosial) target 57,32 % realisasi 57,63 % capaian 100,72 %.

3. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

II. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 secara umum penyerapan anggaran telah mendekati target yang ditetapkan.

b. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dinas Sosial dalam percepatan pelaksanaan program kegiatan pada triwulan berikutnya.

III. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2026. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Juli 2026
Plt. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan



Dr. Drs. Edward Candra, M.H
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19720906 199201 1002

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JUNI / TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Bobot (%)	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Keterangan/Kendala/ Hambatan
							(Rp)	Bobot (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL											
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi	%	100	40,00	23.632.083.703	8.963.229.482	37,93	40,00	APBD	17 Kabupaten/Kota	-
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilakukan	Dokumen	3	32,50	79.610.000	20.026.243,00	25,16	32,50	APBD	17 Kabupaten/Kota	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	40,00	31.640.000	10.154.053	32,09	40,00	APBD	Palembang	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	25,00	47.970.000	9.872.190	20,58	25,00	APBD	17 Kabupaten/Kota	-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan administrasi keuangan PD yang dilaksanakan	Unit	68	40,00	21.034.877.575	8.022.330.627,00	38,14	40,00	APBD	Palembang dan OI	-
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gai dan Tunjangan ASN	orang/bln	222	45,00	20.769.317.575	7.964.440.627	38,35	45,00	APBD	Palembang dan OI	-
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	Dokumen	12	35,00	265.560.000	57.890.000	21,80	35,00	APBD	Palembang dan OI	-
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Lokasi	3	10,00	62.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI	-
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Unit	1	10,00	12.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI	-
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	20	10,00	50.000.000	-	0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI	-
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	Orang	500	56,25	373.742.161	209.767.601	56,13	56,25	APBD	Palembang dan OI	-
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	60,00	18.000.000	8.994.500	49,97	60,00	APBD	Palembang dan OI	-
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	35,00	30.000.000	7.719.100	25,73	35,00	APBD	Palembang dan OI	-
3	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	12	55,00	125.000.000	55.950.250	44,76	55,00	APBD	Palembang dan OI	-
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	1	75,00	200.742.161	137.103.751	68,30	75,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-

E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan PD yang terlaksana	%	100	43,33	1.912.253.967	655.777.961	34,29	43,33	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	30,00	6.000.000	1.500.000	25,00	30,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	55,00	680.453.967	304.652.961	44,77	55,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	45,00	1.225.800.000	349.625.000	28,52	45,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan BMD yang terlaksana	%	100	30,00	169.600.000	55.327.050	32,62	30,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Unit	45	45,00	140.000.000	52.195.050	37,28	45,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	25,00	20.000.000	3.132.000	15,66	25,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	20,00	9.600.000	-	0,00	20,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI	-
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase kegiatan Pemberdayaan Sosial yang terlaksana	%	100	35,00	254.950.000	9.929.015	3,89	35,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	-
A	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase PSKS yang mendapatkan kapasitas kewenangan provinsi	%	100	31,25	254.950.000	9.929.015	3,89	31,25	APBD	17 Kab/Kota	-
1	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	Lembaga	100	20,00	27.500.000	-	0,00	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	-
2	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan provinsi	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan/atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	org	100	65,00	32.950.000	9.929.015	30,13	65,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	-
3	Fasilitasi Pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi warakawuri/ keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda duda perintis kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Jumlah warakawuri/keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda duda perintis kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	100	20,00	150.000.000	-	0,00	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	-
4	Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Jumlah Orang yang mengikuti dan mendapatkan pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai nilai kepahlawanan	Orang	100	20,00	44.500.000	-	0,00	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	-
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase kegiatan Penanganan Warga Negara Migran tindak kekerasan yang terlaksana	%	100	20,00	25.000.000	3.925.140	15,70	20,00	APBD	SumSel	-
A	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Prosentase kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal yang terlaksana	%	100	20,00	25.000.000	3.925.140	15,70	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	-
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kaupaten/kota	org	50	20,00	25.000.000	3.925.140	15,70	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	-

IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan program Rehabilitasi Sosial	%	100	45,00	7.900.202.000	2.730.543.520	34,56	45,00	APBD	SumSel	-
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Prosentase Disabilitas terlantar yg terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100	34,17	495.077.000	144.852.302	29,26	34,17	APBD	Sumsei	-
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	25	30,00	213.567.000	54.221.347	25,39	30,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	25	30,00	15.000.000	3.700.000	24,67	30,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
3	Penyediaan Asrama yang Mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	25	20,00	9.000.000	-	0,00	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	25	25,00	15.000.000	2.000.000	13,33	25,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	25	45,00	227.510.000	77.510.000	34,07	45,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
6	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	25	55,00	15.000.000	7.420.955	49,47	55,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
B	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Prosentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100	48,33	1.514.775.000	509.692.610	33,65	48,33	APBD	17 kab/Kota	-
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	130	45,00	1.034.775.000	339.846.850	32,84	45,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	130	20,00	50.000.000	5.000.000	10,00	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	130	60,00	15.000.000	7.485.660	49,90	60,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	130	40,00	366.000.000	130.000.000	35,52	40,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas hidup sehari - hari kewenangan provinsi	Orang	130	55,00	25.000.000	12.431.600	49,73	55,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
6	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	130	70,00	24.000.000	14.928.500	62,20	70,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
C	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Prosentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100	39,38	2.498.500.000	948.503.017	37,96	39,38	APBD	17 kab/Kota	-
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	45,00	1.971.000.000	813.805.517	41,29	45,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	20,00	62.500.000	-	0,00	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
3	Penyediaan Asrama yang Mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	20,00	0	-	#DIV/0!	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	200	100,00	25.000.000	24.697.500	98,79	100,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	45,00	360.000.000	90.000.000	25,00	45,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas hidup sehari - hari kewenangan provinsi	Orang	200	20,00	25.000.000	-	0,00	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
7	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	20,00	5.000.000	-	0,00	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-
8	Pemulasaran	Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi	Orang	200	45,00	50.000.000	20.000.000	40,00	45,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec. Kel.	-

D	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100	40,00	2.241.950.000	685.993.360	30,60	40,00	APBD	17 kab/Kota	-
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	180	45,00	1.792.950.000	585.247.610	32,64	45,00	APBD	17 kab/Kota	-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	180	90,00	60.000.000		0,00	90,00	APBD	17 kab/Kota	-
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	180	20,00	35.000.000	-	0,00	20,00	APBD	17 kab/Kota	-
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	180	35,00	285.000.000	89.000.000	31,23	35,00	APBD	17 kab/Kota	-
5.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas hidup sehari - hari kewenangan provinsi	Orang	180	45,00	20.000.000	8.000.000	40,00	45,00	APBD	17 kab/Kota	-
6	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	180	25,00	24.000.000	3.745.750	15,61	25,00	APBD	17 kab/Kota	-
7	Pemulasaran	Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi	Orang	180	20,00	25.000.000	-	0,00	20,00	APBD	17 kab/Kota	-
E	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya si Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100	52,14	1.149.900.000	441.502.231	38,39	52,14	APBD	17 kab/Kota	-
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	35,00	450.900.000	141.687.761	31,42	35,00	APBD	17 kab/Kota	-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	75,00	37.500.000	24.987.500	66,63	75,00	APBD	17 kab/Kota	-
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	100	75,00	7.200.000	4.995.000	69,38	75,00	APBD	17 kab/Kota	-
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	45,00	576.800.000	228.600.000	39,63	45,00	APBD	17 kab/Kota	-
5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas hidup sehari - hari kewenangan provinsi	Orang	100	60,00	45.000.000	24.997.970	55,55	60,00	APBD	17 kab/Kota	-
6	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	55,00	32.500.000	16.234.000	49,95	55,00	APBD	17 kab/Kota	-
7	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli anak, lanjut usia dan disabilitas serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Lainnya	Orang	600	20,00	0	-	#DIV/0!	20,00	APBD	17 kab/Kota	-

V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase kegiatan perlindungan dan jaminan sosial yang terlaksana	100%	100	35,00	417.120.000	45.489.815	10,91	35,00	APBD	17 kab/Kota	-
A	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah kewenangan provinsi	kab/kota	17	31,25	417.120.000	45.489.815	10,91	31,25	APBD	17 kab/Kota	-
1	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Masyarakat	Orang	1.200	35,00	21.680.000	6.856.700	31,63	35,00	APBD	17 kab/Kota	-
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi	Orang	51	25,00	244.390.000	13.847.935	5,67	25,00	APBD	17 kab/Kota	-
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang aktif melaksanakan pemutakhiran Data Fakir Miskin	kab/kota	17	25,00	120.640.000	4.953.660	4,11	25,00	APBD	17 kab/Kota	-
4	Fasilitasi Pengembangan potensi pendamping program bantuan sosial	Jumlah Pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Orang	51	75,00	30.410.000	19.831.520	65,21	75,00	APBD	17 kab/Kota	-
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase layanan penanganan bencana yang terlaksana	%	100	35,00	679.000.000	142.865.980	21,04	35,00	APBD	17 kab/Kota	-
A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Prosentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	33,33	679.000.000	142.865.980	21,04	33,33	APBD	17 kab/Kota	-
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah pengungsi yang mendapatkan permakanan 3x1hari dalam masa tanggap darurat kewenangan provinsi	Orang	3.000	20,00	300.000.000	-	0,00	20,00	APBD	17 kab/Kota	-
2	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan provinsi	Orang	1.000	50,00	244.000.000	109.265.980	44,78	50,00	APBD	17 kab/Kota	-
3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan provinsi	Orang	50	30,00	135.000.000	33.600.000	24,89	30,00	APBD	17 kab/Kota	-
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase TMP yang terpelihara	%	100	35,00	276.320.000	23.877.450	8,64	35,00	APBD	Palembang	-
A	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Prosentase kegiatan pengelolaan TMP yang terlaksana	%	100	35,00	276.320.000	23.877.450	8,64	35,00	APBD	Palembang	-
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaanny pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	makam	12	50,00	12.000.000	5.877.450	48,98	50,00	APBD	Palembang	-
2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	laporan	12	35,00	64.320.000	18.000.000	27,99	35,00	APBD	Palembang	-
3	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang	100	20,00	200.000.000	-	0,00	20,00	APBD	Palembang	-
Jumlah						33.184.675.703	11.919.860.402	35,92	40,00	APBD	17Kab/Kota	-

Jumlah Program : 7 Program
Jumlah Kegiatan : 16 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan : 66 Sub Kegiatan

Palembang, 2026
Pit.KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dr. Drs. Edward Candra, M.H
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19720906 199201 1002